

INOVASI LAYANAN UNTUK KELOMPOK MARJINAL

OGI NEWS

JUNE, 21 2021



Pada hari Selasa 18 Mei 2021, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) mengadakan acara webinar melalui aplikasi Zoom. Webinar ini merupakan rangkaian dari acara Open Government Week (OG Week) yang diselenggarakan oleh Open Government Indonesia (OGI). Dalam webinarnya Lakpesdam PBNU mengangkat tema “Inovasi Layanan untuk Kelompok Marjinal”. Tujuan diselenggarakannya webinar dengan tema tersebut adalah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai inovasi yang telah berhasil dilakukan oleh Lakpesdam PBNU cabang daerah di dua kabupaten yaitu Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

On Tuesday 18 May 2021, the Institute for the Study and Development of Human Resources of the Nahdlatul Ulama Executive Board (Lakpesdam PBNU) held a webinar via the Zoom application. This webinar is part of Open Government Week (OG Week) events organized by Open Government Indonesia (OGI). In this webinar, Lakpesdam PBNU raised the theme of “Service Innovation for Marginal Groups”. The purpose of the webinar is to share the experiences and knowledge on innovations that have been successfully carried out by Lakpesdam PBNU regional branches in two districts, namely Bulukumba Regency, South Sulawesi Province, and Tasikmalaya Regency, West Java Province.

Dalam webinar ini, Lakpesdam PBNU Cabang Kabupaten Bulukumba diwakili oleh **Bapak H. Muhammad Nur Ala** yang memberikan pemaparan mengenai “Praktik Layanan dari Bumi Panrita Lopi”. Di Kabupaten Bulukumba terdapat masyarakat adat Ammatoa Kajang yang belum mendapatkan pelayanan publik yang layak seperti layanan bansos, kesehatan, dan pendidikan. Kesulitan masyarakat adat Kajang dalam mengakses pelayanan publik disebabkan oleh kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak mereka miliki sehingga mereka tidak tercatat dalam administrasi kependudukan pemerintah. Permasalahan masyarakat adat Kajang yang tidak ber-KTP berakar dari peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba yang mengharuskan masyarakat adat Kajang yang hendak foto KTP harus melepaskan penutup kepala mereka. Peraturan Disdukcapil ini bertentangan dengan peraturan adat Kajang yang melarang warganya melepaskan penutup kepalanya. Oleh karena itu, masyarakat adat Kajang enggan untuk membuat KTP. Masyarakat adat Kajang yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lain membuat mereka terstigma sebagai orang yang terbelakang dan bodoh. Dikatakan oleh Pak Nur Ala, narasi ini bisa ditemukan dalam naskah akademik Perda No. 9 Tahun 2015 tentang pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Mengetahui masalah ini kemudian Pak Nur Ala bersama dengan Lakpesdam PBNU Cabang Bulukumba berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk membuat aturan baru yang memperbolehkan masyarakat adat Kajang untuk berfoto dengan penutup kepala. Pak Nur Ala menuturkan bahwa pada awalnya gagasan ini tidak bisa dipenuhi oleh Disdukcapil. Namun, Lakpesdam PBNU kemudian mengkomunikasikan hal ini ke Bupati Kabupaten Bulukumba dan Kementerian Dalam Negeri

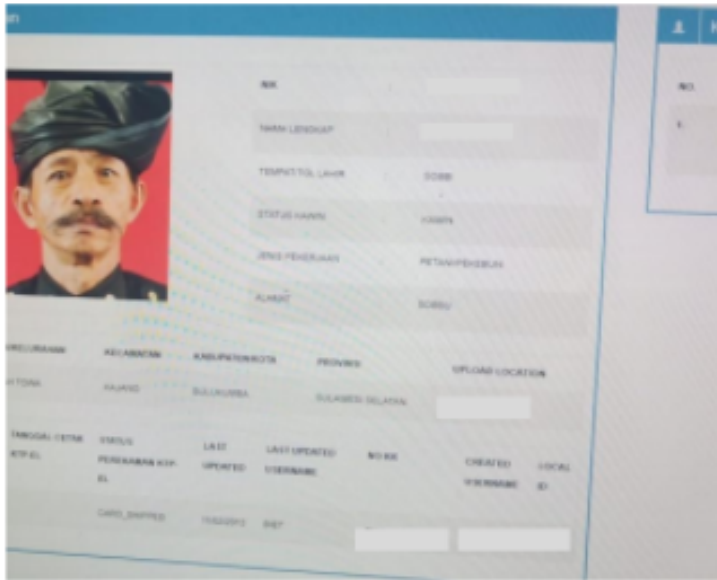
In this webinar, Lakpesdam PBNU Branch of Bulukumba Regency was represented by **H. Muhammad Nur Ala** who delivers a presentation regarding "Service Practices from Bumi Panrita Lopi". In Bulukumba Regency, there are the Ammatoa Kajang indigenous people who have not received proper public services such as social assistance, health, and education services. The obstacle of the Kajang indigenous people in accessing public services is because they do not have identity cards (ID cards) so that they are not recorded in the government's administration. The problem of the Kajang indigenous people who do not have an ID card is rooted in the regulation of the Population and Civil Registration Service (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Disdukcapil) of Bulukumba Regency which requires to not wear any cover on their head in the ID card photos. This Disdukcapil regulation contradicts the Kajang customary regulation which prohibits its members from removing their head coverings. Therefore, the Kajang indigenous people are reluctant to make ID cards. The Kajang indigenous people who do not get an education, health, and other public services have been stigmatized as backward and ignorant people. According to Nur Ala, this narrative can be found in the academic text of Perda No. 9 of 2015 concerning the strengthening and protection of the rights of the Ammatoa Kajang custom law community.

Knowing this problem, Nur Ala together with Lakpesdam PBNU Branch of Bulukumba coordinated with Disdukcapil to issue a new rule that allows Kajang indigenous people to take pictures with their head cover. Nur Ala said that at first this idea could not be fulfilled by Disdukcapil. Then, Lakpesdam PBNU communicated this to the Regent of Bulukumba Regency and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). Eventually, through the Decree of the Regent of Bulukumba Regency,

(Kemendagri). Pada akhirnya melalui Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba masyarakat adat Kajang diperbolehkan untuk menggunakan penutup kepalanya dalam foto KTPnya.

the Kajang indigenous people were allowed to use their head cover in their ID card photos.

Gambar 1. Contoh Foto KTP Masyarakat adat Ammatoa Kajang



Sumber: Paparan Bapak Nur Ala, Lakpesdam PBNU Cabang Kabupaten Bulukumba, 2021

Lakpesdam PBNU kemudian mengadakan kerjasama dengan Pemda Kabupaten Bulukumba melalui program percepatan pelayanan pencatatan dokumen kependudukan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Lakpesdam menyadari bahwa pengambilan data kependudukan tidak bisa langsung dilakukan begitu saja, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Lakpesdam PBNU seperti lokasi masyarakat adat Ammatoa Kajang yang terpencil dan di tengah hutan. Selain itu, perlunya penyesuaian perilaku jika akan pergi ke tempat tinggal mereka seperti tidak boleh membawa alat komunikasi, kendaraan bermotor. Terakhir, menghilangkan pengaruh oknum-oknum yang memobilisasi dan memanfaatkan masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pemilihan umum. Untuk menghadapi hambatan-hambatan ini, Lakpesdam PBNU melakukan pendekatan edukasi untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat adat Ammatoa Kajang mengenai pentingnya pembuatan KTP,

The Lakpesdam PBNU then collaborated with the Government of Bulukumba Regency to make a program to accelerate the service of recording population documents for the Ammatoa Kajang indigenous people. Lakpesdam realizes that data collection cannot be done just like that. There are several challenges that must be faced by Lakpesdam PBNU such as the location of the Ammatoa Kajang indigenous community which is remote and in the middle of the forest. In addition, the need for behavioral adjustments when going to their place of residence such as not being allowed to bring communication tools, motorcycles. Finally, eliminating the influence of those who mobilized and used the Ammatoa Kajang indigenous people only for an election. To deal with these obstacles, Lakpesdam PBNU took an educational approach to provide understanding and awareness to the Ammatoa Kajang indigenous community regarding the importance of making ID cards, Family Cards, and Birth Certificates and making other important documents.

Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, dan x
pembuatan dokumen penting lainnya.

Gambar 2. Kegiatan Lakpesdam Cabang Kabupaten Bulukumba



Sumber: Paparan Bapak Nur Ala, Lakpesdam PBNU Cabang Kabupaten Bulukumba, 2021.

Setelah melalui berbagai pendekatan program Lakpesdam PBNU dan Disdukcapil ini menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena masyarakat adat Ammatoa Kajang sudah mulai sadar akan pentingnya pencatatan administrasi kependudukan maka anak-anak mereka yang selama ini haknya termarginalkan sudah bisa mengakses pendidikan sebagaimana masyarakat lainnya.

After going through various approaches, the Lakpesdam PBNU and Disdukcapil programs have shown good results. Because the Ammatoa Kajang indigenous people have begun to realize the importance of recording population administration, their children, whose rights have been marginalized, can access education like other communities.

Gambar 3. Anak Masyarakat adat Ammatoa Kajang bersekolah



Sumber : Paparan Bapak Nur Ala, Lakpesdam PBNU Cabang Kabupaten Bulukumba, 2021

Pembicara selanjutnya adalah **Bapak Ajat Sudrajat** mewakili Lakpesdam NU Tasikmalaya untuk memaparkan materi tentang “Peran Komunitas Rehabilitas Berbasis Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dengan Disabilitas”. Berdasarkan penuturan Pak Ajat Lakpesdam NU menemukan beberapa masalah terkait penyandang disabilitas anak yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya. Temuan tersebut diantaranya adalah: tidak ada data penyandang disabilitas anak yang akurat, terbatasnya SDM yang memahami konsep pemberdayaan penyandang disabilitas, tingginya angka kekerasan terhadap anak, minimnya dukungan dari desa, objektifikasi terhadap penyandang disabilitas anak, dan adanya pola asuh yang keliru.

Dari temuan masalah yang ada kemudian Bapak Ajat menarik garis merah atau inti permasalahannya yaitu tidak dipenuhinya hak anak dengan disabilitas. Untuk itu, Lakpesdam NU membuat Pandu Desa Inklusi yaitu program rehabilitasi berbasis masyarakat untuk pemenuhan hak anak dengan disabilitas. Melalui program ini Lakpesdam NU Tasikmalaya melakukan upaya penguatan pada tatanan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih komprehensif bagi anak dengan disabilitas. Terdapat tiga layanan utama dalam program ini yaitu:

1. Kesehatan, pelayanan ini dilakukan dengan memonitoring perkembangan dan pertumbuhan anak dengan disabilitas, memberikan bantuan makanan tambahan agar anak dengan disabilitas mendapatkan asupan gizi yang cukup, terapi anak, dan sosialisasi kebutuhan kesehatan.

The next speaker was Ajat Sudrajat representing Lakpesdam NU Tasikmalaya to present material on "The Role of Community-Based Rehabilitation Communities in Fulfilling the Rights of Children with Disabilities". Ajat Lakpesdam stated that he found several problems related to children with disabilities faced by Tasikmalaya Regency. These findings include: there is no accurate data on children with disabilities, limited human resources who understand the concept of empowering people with disabilities, high rates of violence against children, lack of support from villages, objectification of children with disabilities, and false parenting knowledge.

From the findings of the existing problems, Ajat drew a red line of the problem, namely the non-fulfillment of the rights of children with disabilities. To that end, Lakpesdam NU created Pandu Desa Inklusi, a community-based rehabilitation program to fulfill the rights of children with disabilities. Through this program, Lakpesdam NU Tasikmalaya has made efforts to strengthen the structure of families, schools, communities, and the government so that they are able to provide more comprehensive services for children with disabilities. There are three main services in this program, namely:

1. Health, this service is carried out by monitoring the development and growth of children with disabilities, providing additional food assistance so that children with disabilities get adequate nutritional intake, child therapy, and socializing health needs.

Gambar 4. Pelayanan Kesehatan oleh Lakpesdam NU Tasikmalaya



Sumber : Paparan Bapak Ajat, Lakpesdam NU Tasikmalaya, 2021.

2.Administrasi Kependudukan, pelayanan ini membantu para orang tua anak dengan disabilitas agar tertib administrasinya sehingga kedepannya tidak terjadi masalah administrasi ketika akan mengakses pelayanan publik lainnya.

3.Pendidikan, pada layanan ini Lakpesdam NU mengadakan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Lakpesdam NU menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah khusus anak dengan disabilitas, dan membantu Dinas Pendidikan untuk melakukan reorientasi arah pendidikan sehingga ilmu yang dimiliki anak dengan disabilitas relevan dengan perkembangan zaman.

Selain layanan di atas, Lakpesdam NU juga rutin mengadakan forum komunikasi keluarga anak disabilitas. Forum ini menjadi ruang belajar bagi orang tua atau keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas untuk berbagi pengalaman mengenai pola asuh anak, kebutuhan kesehatan anak, kebutuhan pendidikan anak, dll.

2.Population Administration, this service helps parents of children with disabilities to take care of their administration needs so that in the future there will be no administrative problems when accessing other public services.

3.Education, Lakpesdam PBNU holds teaching and learning activities outside of school. By collaborating with the Tasikmalaya District Education Office (Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya), Lakpesdam PBNU provides a teaching staff in special schools for children with disabilities and helps the Education Office to reorient the direction of education so that the knowledge possessed by children with disabilities is relevant to the present times.

In addition to the services above, Lakpesdam NU also regularly holds a communication forum for families of children with disabilities. This forum is a learning space for parents or families with children with disabilities to share experiences regarding child care patterns, children's health needs, children's educational needs, etc.

Gambar 5. Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas



Sumber : Paparan Bapak Ajat, Lakpesdam NU Tasikmalaya, 2021.

Selanjutnya Lakpesdam PBNU akan terus melakukan ko-kreasi baik dengan pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjangkau dan memperjuangkan hak masyarakat yang rentan atau termarginalkan agar mereka mendapatkan haknya sebagai bagian dari warga negara Indonesia

Furthermore, Lakpesdam PBNU will continue to co-create both with the government and civil society to reach out and fight for the rights of vulnerable or marginalized communities so they achieve their rights as part of Indonesian citizens.